



**LAPORAN KEGIATAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR-RI  
KE  
PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI  
PROVINSI JAMBI  
DALAM RANGKA PENGAWASAN PRODUKSI/LIFTING MIGAS DAN KENDALANYA  
31 Januari – 2 Februari 2020**

**MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019 – 2020**

**SEKRETARIAT KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2020**

## **BAGIAN I PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Semangat *Road to Giant Discovery* SKK Migas tidak hanya peningkatan luar biasa dalam eksplorasi sumber-sumber minyak yang baru yang sepenuhnya didukung oleh Komisi VII DPR-RI, namun juga perawatan atas sumur-sumur migas yang sedang berproduksi. Bahkan, dengan teknologi yang tepat diupayakan agar dapat dilakukan “re-aktivasi” ladang migas yang tua.

Sebagai urutan ke 3 (tiga) terbesar dalam realisasi produksi migas pada tahun 2019, data kinerja Pertamina EP menunjukkan terjadinya *decline rate* yang lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sehingga capaiannya pada tingkat 92,8% terhadap target APBN. Hal yang menarik perhatian adalah adanya peningkatan produksi pada sumur Pertamina EP Asset 1 Jambi di desa Talang Belido, Sungai Gelam. Namun pada sisi lain, Pertamina EP Asset 1 juga menghadapi kesulitan dalam pembebasan lahan. Hal lain yang lebih bersifat *latent* adalah adanya *illegal tapping* bahkan *illegal drilling* di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Jambi ini.

Untuk itu, Komisi VII DPR-RI merasa perlu untuk dapat secara langsung mengkaji situasi lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran lengkap. Dengan demikian, Komisi VII DPR-RI dapat memberikan dukungan politik yang lebih tepat sasaran.

### **I.2. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR-RI ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Peraturan Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR-RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 – 2020

### **I.3. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN**

Maksud kunjungan lapangan ini adalah sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR-RI, khususnya fungsi pengawasan. Adapun tujuan kunjungan ini secara khusus adalah :

1. Mendapatkan informasi lapangan terkini perkembangan Pertamina EP Asset 1 Jambi
2. Mengetahui secara langsung pada sumbernya dan pihak yang berkepentingan lainnya atas kendala, hambatan, gangguan bahkan jika ada ancaman yang dihadapi Pertamina EP Asset 1 Jambi
3. Memperoleh kepastian informasi terkait prospek Pertamina EP Asset 1 Jambi

### **I.4. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN**

Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR-RI dilaksanakan pada tanggal 31 Januari – 2 Februari 2020 dan lokasi tujuan kunjungan adalah Pertamina EP Asset 1 Jambi. Sedangkan agenda kegiatan adalah melakukan pertemuan dengan semua pihak terkait. Adapun lokasi kunjungan adalah kantor pusat Pertamina EP Asset 1 Jambi di Kenali Asam, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

## I.5. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN

Sasaran kegiatan kunjungan lapangan ini adalah mendapatkan gambaran menyeluruh tentang Pertamina EP Asset 1 Jambi dan proyeksi pengembangan kegiatan produksi migasnya beserta semua tantangan langsung maupun tidak langsung.

## I.6. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR-RI ke Pertamina EP Asset 1 Jambi ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR-RI yang merupakan representasi fraksi-fraksi DPR-RI sebagaimana dalam tabel berikut ini :

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANG.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1	H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak, MM, CA	A-63	FP-GERINDRA	Ketua Tim
2	Dony Maryadi Oekon, ST	A-176	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
3	Paramita Widya Kusuma, SE	A-198	F-PDI PERJUANGAN	Anggota
4	Maman Abdurrahman, ST	A-332	FP-GOLGAR	Anggota
5	H. Rudy Mas'ud, SE	A-337	FP-GOLKAR	Anggota
6	Dra. Hj. Haeny Relawati Rini W, M.Si	A-321	FP-GOLKAR	Anggota
7	Moreno Soeprpto	A-110	FP-GERINDRA	Anggota
8	Ina Elisabeth Kobak, ST	A-407	FP-NASDEM	Anggota
9	H. Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sosio	A-31	F-PKB	Anggota
10	H. Abdul Wahid, S.Pd.I	A-4	F-PKB	Anggota
11	Marthen Douw	A-58	F-PKB	Anggota

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>NO. ANG.</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
12	H. Rofik Hananto, SE	A-443	F-PKS	Anggota
13	Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc	A-517	F-PAN	Anggota
14	H. Lulung Abraham Lunggana, SH	A-494	F-PAN	Anggota
15	Dra. Nanik Herry Murti		Sekretaris Tim	
16	Daday, SE		Sekretaris Tim	
17	Khairunisa Septiyani		Sekretaris Tim	
18	Taufan Tampubolon		Tenaga Ahli	
19	Yaserto Denus		TV Parlemen	
20	M. Andri Nurdiansyah		Pemberitaan DPR-RI	

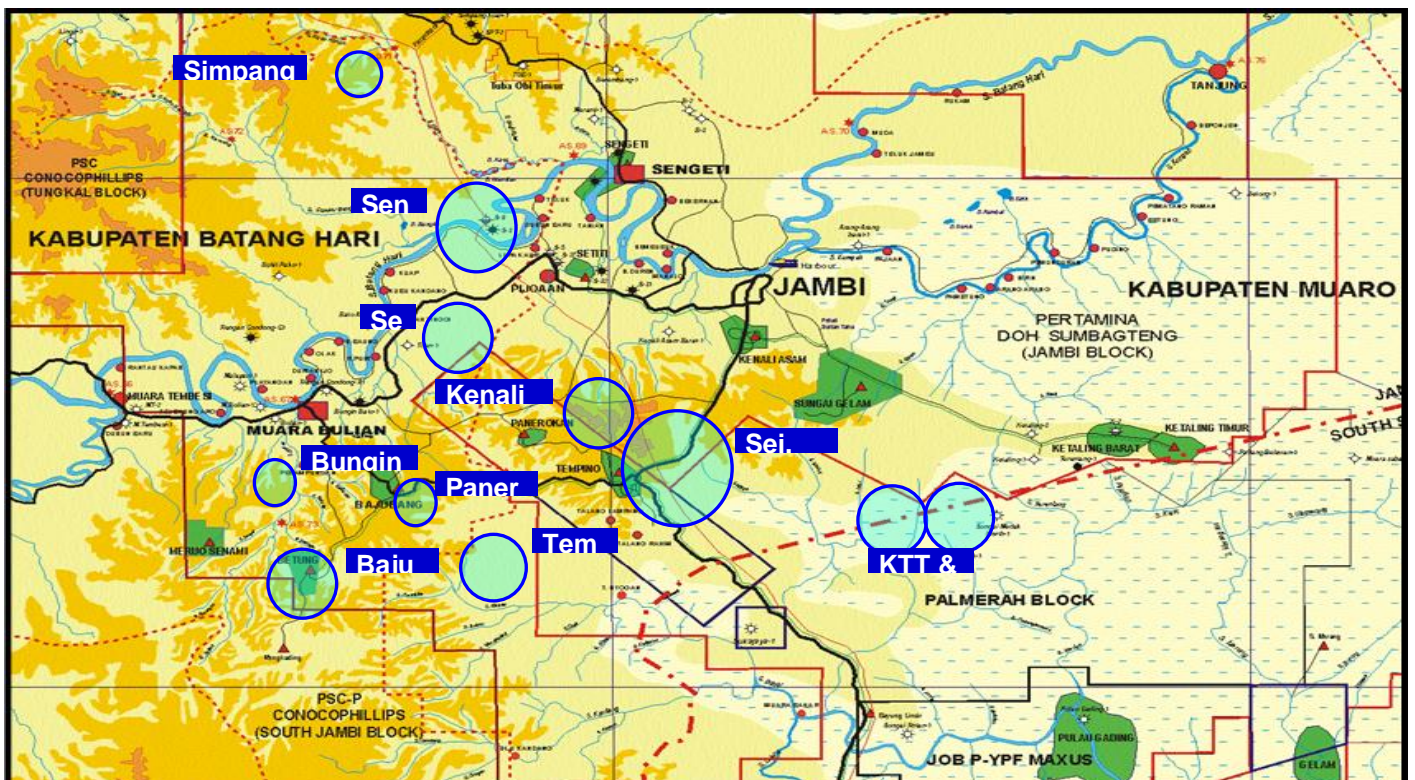
## BAGIAN II

### PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja spesifik ini, Tim Komisi VII bertemu dengan Presiden Direktur PT Pertamina EP bersama Deputi Operasi SKK Migas, Direktur Korporat PT Pertamina (Persero), Plt. Dirjen Migas, Asisten II Gubernur Jambi, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Wakil Walikota Jambi serta seluruh jajarannya.

#### II.1. PROFIL PERTAMINA EP ASSET 1 JAMBI

PT Pertamina EP mengelola Asset 1 (Field-field Rantau - Aceh, Pangkalan Susu - Sumatera Utara, Lirik - Riau, Jambi - Jambi, Ramba – Sumatera Selatan), Asset 2 (Field-field Prabumulih, Pendopo, Limau dan ADERA di Sumatera Selatan), Asset 3 (Field-field Subang, Jatibarang dan Tambun di Jawa Barat), Asset 4 (Field-field Cepu – Jawa Tengah & Jawa Timur, Poleng – Jawa Timur, Papua – Papua Barat, Donggi dan Sukowati), Asset 5 (Field-field Sangatta, Bunyu, Sangasanga dan Tarakan di Kalimantan Timur, Tanjung – Kalimantan Selatan).



Gambar grafis sebelumnya adalah wilayah kerja PT Pertamina EP Asset 1 Field Jambi yang memiliki luas wilayah 5751 km<sup>2</sup> yang akan berakhir kontraknya pada 17 September 2035. Field Jambi ini mencakup lapangan-lapangan Kenali Asam, Tempino, Simpang Tuan, Bungin Batu, Ketaling Timur, Ketaling Barat, Sungai Gelam, Setiti, Sengeti, Panerokan, Bajubang, Tuba Obi dan Barbosela.

## II.2. MASALAH DAN PENYELESAIANNYA

Pada PT Pertamina EP Asset 1 ini menghadapi 2 (dua) kendala utama yakni :

1. Adanya kegiatan *illegal drilling* di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi yang mengakibatkan terhambatnya proses pembebasan lahan pada rencana kerja pemboran tahun 2018 di struktur Betung.
2. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi sejak tahun 2013 yang menyebabkan pesatnya perkembangan pembangunan yang sangat berdekatan dengan area sumur migas. Dampaknya adalah terbatasnya kegiatan operasi dan rencana pengembangan sumur migas di Kenali Asam.

Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diatas, diantaranya sebagai anggota Tim Terpadu yang dibentuk dengan SK Gubernur untuk meniadakan *illegal drilling* dan juga koordinasi dengan instansi terkait untuk sosialisasi dan negosiasi dalam pembebasan lahan. Namun, tampaknya belum menghasilkan capaian yang diharapkan.

Adapun pendalaman dalam kunjungan kerja spesifik ini, mulai dari pendekatan yang akan dilakukan berbeda dengan yang sudah pernah dilakukan dalam mengatasi *illegal drilling* hingga program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diwujudkan oleh PT Pertamina EP Asset 1 Jambi. Fokus pendalaman ini tetap bermuara pada peningkatan produksi dan lifting migas di Jambi dan untuk memudahkan membangun *buffer zone* yang dibutuhkan dalam operasi. Bahkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 dirasakan sudah kurang memadai lagi. Belum lagi informasi perihal adanya sekitar 1000 sumur *illegal drilling* bahkan



dimutakhirkan oleh data ESDM Provinsi Jambi bahwasanya terdapat sekitar 4000 sumur liar dan kebanyakan berada di wilayah Taman Nasional. Kendati mengejutkan, namun pasti diperlukan tindak lanjut yang sesegera mungkin adalah adanya informasi bahwasanya selama ini terdapat 80% asset Pertamina yang kurang/tidak produktif. Sehingga untuk wilayah Jambi saja harus segera ditindak-lanjuti mengingat *illegal drilling* ini mampu memproduksi hingga 3000 BOPD.

### II.3. DOKUMENTASI KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK







### **BAGIAN III**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam proses diskusi pada kunjungan kerja spesifik dapat disimpulkan :

1. Komisi VII meminta Pertamina EP untuk lebih fokus dalam meningkatkan produksi dan inovasi migas dengan mengandalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dan merevitalisasi asset yang kurang/tidak produktif.
2. Komisi VII mendorong Pertamina EP untuk pro-aktif dalam revisi PerMen ESDM No. 1 Th. 2008 yang mengakomodasi sumur-sumur tua sedangkan wilayah kerjanya terdapat sumur-sumur migas yang relatif tidak dalam selain sumur tua.

Oleh karena itu dapat direkomendasikan :

1. Segera dilakukan identifikasi 80% asset perusahaan yang kurang/tidak produktif. Sehingga dapat dipilah asset yang dapat sepenuhnya membantu revitalisasi sumber daya PT Pertamina EP
2. Seiring dengan ekspektasi adanya revisi PerMen ESDM No. 1 Th. 2008 maka asset yang tidak optimal dapat dimanfaatkan bersama pihak lain misalnya kerjasama operasi untuk sumur-sumur yang tidak dalam sehingga secara tidak langsung sebagai salah satu wahana untuk mengatasi adanya *illegal drilling*.

### **PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR-RI ke Pertamina EP Asset 1 Jambi. Kiranya dapat memberikan manfaat.

Jakarta, Februari 2020

**Ketua Tim,**

**H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE, Ak, MM, CA**

